



# RENCANA KERJA



**DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 ini pula diharapkan dapat bermakna strategis dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan disertai sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013.

Semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Surabaya, Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Drs. Ec. A.A. GDE RAKA WIJA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19550219 198003 1 009

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>Bab I : Pendahuluan</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja	9
<b>Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu</b>	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	11
2.2 Usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013	34
2.3 Asumsi Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013	38
2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	38
2.5 Tantangan dan Peluang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	40
2.5.1 <i>Strength</i> (Kekuatan)	40
2.5.2 <i>Weakness</i> (Kelemahan)	42
2.5.3 <i>Opportunity</i> (Peluang)	42
2.5.4 <i>Threat</i> (Ancaman)	43
2.6 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan dan Strategi dan Kebijakan	44

2.6.1	Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan	44
2.6.2	Strategi dan Kebijakan	45
2.7	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selaku SKPD maupun SKPKD	48
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>		<b>51</b>
3.1	Tujuan	51
3.2	Sasaran	53
3.3	Program	54
3.4	Kegiatan	55
<b>BAB IV : PENUTUP</b>		<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2012	12
Tabel 2.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012	14
Tabel 2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012	19
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012	21
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013	34
Tabel 3.1	Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844), Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang menyusunnya berpedoman kepada RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan

disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja SKPD juga merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD perlu

ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana Kerja (Renja) SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Rencana Strategis (Renstra) SKPD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009-2014 kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam membangun kesepaham, kesepakatan dan komitmen bersama di dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 dan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- c. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- d. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta keselarasan program dan kegiatan dengan penganggaran;
- e. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

###### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

###### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)**

Memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

###### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

##### **Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

- 2.2 Usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013
- 2.3 Asumsi Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013
- 2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.5 Tantangan Dan Peluang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
  - 2.5.1 *Strength* (Kekuatan)
  - 2.5.2 *Weakness* (Kelemahan)
  - 2.5.3 *Opportunity* (Peluang)
  - 2.5.4 *Threat* (Ancaman)
- 2.6 Faktor-Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Strategi Dan Kebijakan
  - 2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan
  - 2.6.2 Strategi dan Kebijakan
- 2.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selaku SKPD maupun SKPKD

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Program
- 3.4 Kegiatan

**BAB IV : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 secara umum telah mencapai sasaran atau target yang diharapkan.

Berikut adalah uraian tentang capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2012. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012) menunjukkan Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun Dasar (yaitu pada Tahun 2009) sebesar 22% pada Tahun 2010, pada Tahun 2011 menjadi sebesar 48,82%, dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 59,44%.

Sedangkan Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari saldo Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) awal tahun (*base line* tahun 2009) juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan yaitu pada Tahun 2010 tercapai penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 42,38%, pada Tahun 2011 sebesar 131,86%, dan pada Tahun 2012 menjadi sebesar 65,06%.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan tahun 2012) menunjukkan peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),



yaitu pada Tahun 2010 sebesar 84,41 menjadi 85,06 pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2012 naik menjadi sebesar 86,19.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Kantor Bersama (KB) Samsat yang berstandar atau telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari target awal 48 (empat puluh delapan) KB Samsat. pada tahun 2010 rasio capaian kinerjanya (*performance gap*) sebesar 100%, kemudian pada tahun 2011 rasio capaian kinerja dapat dipertahankan sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama (KB) Samsat di Jawa Timur yang dapat mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001:2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2012 rasio capaian kinerjanya sebesar 100%.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2012**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Performance Gap		
			2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
I.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	15%	35%	55%	22,00%	48,82%	59,44%	146,67%	139,49%	108,07%
		2. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB	30,00%	30,00%	30,00%	42,38%	131,86%	65,06%	141,27%	439,53%	216,87%
II.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Nilai IKM	83,50	84,00	84,50	84,41	85,06	86,19	101,09%	101,26%	102,00%
		2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	48	48	48	48	100,00%	100,00%	100,00%

Di dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indikator Hasil, Satuan dan Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012.

Dengan demikian diharapkan segala Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan terarah sesuai Target yang ditetapkan.

Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan *progress* pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian–capaian target-target yang telah ditetapkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dengan tidak mengabaikan program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka pada Tahun Anggaran 2012 kebutuhan anggaran tersebut yang telah diwujudkan dalam 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Anggaran 2012 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kegiatan yang bersifat regular dan

rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis di dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat dijadikan dasar evaluasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Secara keseluruhan dapat dijabarkan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut seperti dideskripsikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)**  
**Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2012**

No.	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Rasio Capaian (%)
1.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	81.131.428.626,00	77.283.927.442,00	95,26
a.	<i>Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	11.791.500.000,00	11.569.188.000,00	98,11
b.	<i>Peningkatan Kinerja Operasional</i>	2.431.080.000,00	2.322.549.800,00	95,54
c.	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	1.959.375.000,00	1.809.183.100,00	92,33

No.	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Rasio Capaian (%)
d.	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	693.095.000,00	681.628.400,00	98,35
e.	<i>Retribusi Tempat Pelelangan</i>	558.825.000,00	548.780.000,00	98,20
f.	<i>Peningkatan Pengembangan Kelembagaan</i>	3.542.185.000,00	3.471.266.806,00	98,00
g.	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	15.360.335.986,00	14.999.598.750,00	97,65
h.	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	161.900.000,00	156.740.500,00	96,81
i.	<i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah</i>	1.393.600.000,00	1.257.960.100,00	90,27
j.	<i>Pengembangan Pusat Pengolahan Data Elektronik</i>	1.198.227.500,00	1.182.139.600,00	98,66
k.	<i>Analisis dan Evaluasi Kinerja</i>	4.532.775.000,00	4.172.490.450,00	92,05
l.	<i>Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan</i>	15.754.205.700,00	15.424.317.400,00	97,91
m.	<i>Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	12.861.108.740,00	11.726.559.500,00	91,18
n.	<i>Pengelolaan Data Pendapatan Daerah</i>	4.154.360.000,00	3.530.313.245,00	84,98
o.	<i>Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD</i>	485.670.000,00	340.292.200,00	70,07
p.	<i>Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD</i>	4.253.185.700,00	4.090.919.591,00	96,18

No.	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Rasio Capaian (%)
2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>134.587.106.430,00</b>	<b>133.310.466.242,00</b>	<b>99,05</b>
a.	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	23.211.850.000,00	23.205.602.866,00	99,97
b.	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.739.200.000,00	11.384.558.655,00	96,98
c.	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	221.600.000,00	219.317.750,00	98,97
d.	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	8.946.400.000,00	8.776.829.730,00	98,10
e.	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	7.924.567.640,00	7.682.199.443,00	96,94
f.	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.463.335.490,00	5.366.535.140,00	98,23
g.	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	11.648.736.000,00	11.522.410.858,00	98,92
h.	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor</i>	1.847.413.500,00	1.748.990.000,00	94,67
i.	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	287.680.000,00	281.883.400,00	97,99
j.	<i>Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan</i>	1.294.284.000,00	1.248.268.590,00	96,44
k.	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	1.759.914.800,00	1.759.609.400,00	99,98
l.	<i>Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	7.279.400.000,00	7.276.960.700,00	99,97
m.	<i>Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	21.349.125.000,00	21.346.591.500,00	99,99
n.	<i>Penyediaan jasa lembur</i>	25.928.400.000,00	25.924.730.000,00	99,99
o.	<i>Penyediaan Jasa Kantor</i>	5.685.200.000,00	5.565.978.210,00	97,90

No.	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Rasio Capaian (%)
3.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>45.465.621.744,00</b>	<b>44.580.076.981,00</b>	<b>98,05</b>
a.	<i>Pengadaan kendaran dinas/oprasional</i>	3.510.000.000,00	3.184.860.000,00	90,74
b.	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas</i>	400.000.000,00	397.572.480,00	99,39
c.	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</i>	19.058.944.644,00	19.054.122.041,00	99,97
d.	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional</i>	4.102.700.000,00	4.082.334.980,00	99,50
e.	<i>Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	10.207.629.700,00	9.734.968.425,00	95,37
f.	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik</i>	1.299.875.000,00	1.287.692.315,00	99,06
g.	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu</i>	1.147.690.000,00	1.117.113.050,00	97,34
h.	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</i>	5.738.782.400,00	5.721.413.690,00	99,70
4.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>2.138.983.700,00</b>	<b>1.992.836.375,00</b>	<b>93,17</b>
a.	<i>Pengadaan pakaian kerja lapangan</i>	2.138.983.700,00	1.992.836.375,00	93,17
5.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>29.979.887.000,00</b>	<b>29.572.408.150,00</b>	<b>98,64</b>
a.	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	884.400.000,00	879.783.000,00	99,48
b.	<i>Sosialisasi peraturan perundang – undangan</i>	10.241.100.000,00	10.238.385.050,00	99,97
c.	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing</i>	8.777.000.000,00	8.394.650.000,00	95,64
d.	<i>Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	6.204.050.000,00	6.195.544.900,00	99,86

No.	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Rasio Capaian (%)
e.	<i>Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur</i>	3.873.337.000,00	3.864.045.200,00	99,76
6.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	210.000.000,00	200.400.000,00	95,43
a.	<i>Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur</i>	210.000.000,00	200.400.000,00	95,43

**Tabel 2.2** di atas mendeskripsikan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012; dari 6 (enam) Program yang diimplementasikan semuanya dinyatakan Baik (dengan rentang capaian antara 75% sampai dengan 100%). Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 95,26%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 99,05%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 98,05%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93,17% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98,64% serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah sebesar 95,43%. Sehingga hasil dari pengukuran kinerja program selama Tahun 2012 adalah 579,60% (: ) 6 (enam) Program = 96,60% (nilai rata-rata keenam program).

Dari 46 (empat puluh enam) kegiatan, hanya kegiatan Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD (pada program utama; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang rasio capaiannya atau realisasinya hanya sebesar 70,07%).

Tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.3 (Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012) seperti tersebut di bawah ini.

TABEL 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

NO	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Rasio Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran renja yang dievaluasi (%)	
1.	1.20.0700.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Naikan Pendapatan Asli Daerah	7,751,000,000,000	81,131,428,626	7,863,227,376,466	77,283,927,442	101.45%	95.26
	1.20.0700.17.210	Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	Jumlah kegiatan untuk peningkatan PAD	15 kegiatan	11,791,500,000	15 kegiatan	11,569,188,000	100%	98.11
	1.20.0700.17.211	Peningkatan Kinerja Operasional	Jumlah kegiatan untuk peningkatan kinerja operasional	8 kegiatan	2,431,080,000	8 kegiatan	2,322,549,800	100%	95.54
	1.20.0700.17.212	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	Jumlah kegiatan untuk peningkatan dana bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	6 kegiatan	1,959,375,000	6 kegiatan	1,809,183,100	100%	92.33
	1.20.0700.17.213	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	Jumlah Kegiatan kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	12 kegiatan	693,095,000	12 kegiatan	681,628,400	100%	98.35
	1.20.0700.17.216	Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan	Jumlah retribusi lelang kayu hasil hutan	80 lelang	558,825,000	80 lelang	548,780,000	100%	98.20
	1.20.0700.17.217	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kegiatan untuk pengembangan kelembagaan	13 kegiatan	3,542,185,000	13 kegiatan	3,471,266,806	100%	98.00
	1.20.0700.17.219	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah KB Samsat	48 KB Samsat	15,360,335,986	48 KB Samsat	14,999,598,750	100%	97.65
	1.20.0700.17.221	Peningkatan Kinerja Pelayanan	Jumlah KB Samsat	48 KB Samsat	161,900,000	48 KB Samsat	156,740,500	100%	96.81
	1.20.0700.17.222	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi	12 kegiatan	1,393,600,000	12 kegiatan	1,257,960,100	100%	90.27
	1.20.0700.17.223	Pengembangan Pusat Pengolahan Data Elektronik	Jumlah data yang akurat dan ter-up date	25 unit peralatan	1,198,227,500	25 unit peralatan	1,182,139,600	100%	98.66
	1.20.0700.17.224	Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jumlah kegiatan analisis dan evaluasi kinerja	18 kegiatan	4,532,775,000	18 kegiatan	4,172,490,450	100%	92.05
	1.20.0700.17.229	Pengembangan dan Perbaikan Sarana / Prasarana Kelembagaan	Jumlah sarana / prasarana	1 lokasi	15,754,205,700	1 lokasi	15,424,317,400	100%	97.91
	1.20.0700.17.249	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan	Jumlah kegiatan intensifikasi	8 kegiatan	12,861,108,740	8 kegiatan	11,726,559,500	100%	91.18
	1.20.0700.17.257	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan data	4 kegiatan	4,154,360,000	4 kegiatan	3,530,313,245	100%	84.98
	1.20.0700.17.258	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB, Samsat dan UPTD	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi	4 kegiatan	485,670,000	4 kegiatan	340,292,200	100%	70.07
	1.20.0700.17.259	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB, Samsat dan UPTD	Jumlah KB Samsat	48 KB Samsat	4,253,185,700	48 KB Samsat	4,090,919,591	100%	96.18
2.	1.20.0700.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan		134,587,106,430		133,310,466,242	100%	99.05
	1.20.0700.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat perpajakan	7.196.160 surat perpajakan	23,211,850,000	7.196.160 surat perpajakan	23,205,602,866	100%	99.97
	1.20.0700.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran dalam 1 tahun	12 kegiatan	11,739,200,000	12 kegiatan	11,384,558,655	100%	96.98
	1.20.0700.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan	727 unit	221,600,000	727 unit	219,317,750	100%	98.97
	1.20.0700.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Peningkatan pelayanan	12 kegiatan	8,946,400,000	12 kegiatan	8,776,829,730	100%	98.10
	1.20.0700.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kegiatan kebersihan kantor	12 kegiatan	7,924,567,640	12 kegiatan	7,682,199,443	100%	96.94
	1.20.0700.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK selama1 tahun	215.501 atk	5,463,335,490	215.501 atk	5,366,535,140	100%	98.23
	1.20.0700.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	14.152.858 lembar	11,648,736,000	14.152.858 lembar	11,522,410,858	100%	98.92
	1.20.0700.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen untuk operasional pd tiap kantor	17.612 unit	1,847,413,500	17.612 unit	1,748,990,000	100%	94.67
	1.20.0700.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga selama 1 tahun	4.054 buah	287,680,000	4.054 buah	281,883,400	100%	97.99
	1.20.0700.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	Jumlah buku bacaan dan perundang-undangan	7.590 buku	1,294,284,000	7.590 buku	1,248,268,590	100%	96.44



	1.20.0700.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat	24 kegiatan	1,759,914,800	24 kegiatan	1,759,609,400	100%	99.98
	1.20.0700.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat	94 kegiatan	7,279,400,000	94 kegiatan	7,276,960,700	100%	99.97
	1.20.0700.01.019	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat	162 kegiatan	21,349,125,000	162 kegiatan	21,346,591,500	100%	99.99
	1.20.0700.01.022	Penyediaan jasa lembur	Jumlah orang	1.284 orang	25,928,400,000	1.284 orang	25,924,730,000	100%	99.99
	1.20.0700.01.028	Penyediaan Jasa Kantor	Jumlah kegiatan jasa	12 kegiatan	5,685,200,000	12 kegiatan	5,565,978,210	100%	97.90
3.	<b>1.20.0700.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase jumlah kegiatan yang dilaksanakan</b>		<b>45,465,621,744</b>		<b>44,580,076,981</b>	<b>100%</b>	<b>98.05</b>
	1.20.0700.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	12 unit	3,510,000,000	12 unit	3,184,860,000	100%	90.74
	1.20.0700.02.021	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas	16 unit	400,000,000	16 unit	397,572,480	100%	99.39
	1.20.0700.02.022	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah kantor	82 unit	19,058,944,644	82 unit	19,054,122,041	100%	99.97
	1.20.0700.02.024	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas	737 unit (R2 & R4)	4,102,700,000	737 unit (R2 & R4)	4,082,334,980	100%	99.50
	1.20.0700.02.045	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah peralatan	7.664 unit	10,207,629,700	7.664 unit	9,734,968,425	100%	95.37
	1.20.0700.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	Jumlah kantor	82 kantor	1,299,875,000	82 kantor	1,287,692,315	100%	99.06
	1.20.0700.02.048	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu	Jumlah kantor	48 kantor	1,147,690,000	48 kantor	1,117,113,050	100%	97.34
	1.20.0700.02.049	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah peralatan	16.896 buah	5,738,782,400	16.896 buah	5,721,413,690	100%	99.70
4.	<b>1.20.0700.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai</b>		<b>2,138,983,700</b>		<b>1,992,836,375</b>	<b>100%</b>	<b>93.17</b>
	1.20.0700.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja	12.097 buah	2,138,983,700	12.097 buah	1,992,836,375	100%	93.17
5.	<b>1.20.0700.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas pegawai</b>		<b>29,979,887,000</b>		<b>29,572,408,150</b>	<b>100%</b>	<b>98.64</b>
	1.20.0700.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan	64 kegiatan	884,400,000	64 kegiatan	879,783,000	100%	99.48
	1.20.0700.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	35 kegiatan	10,241,100,000	35 kegiatan	10,238,385,050	100%	99.97
	1.20.0700.05.114	Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing	Jumlah tenaga outsourcing	530 orang	8,777,000,000	530 orang	8,394,650,000	100%	95.64
	1.20.0700.05.119	Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan rapat	10 kegiatan	6,204,050,000	10 kegiatan	6,195,544,900	100%	99.86
	1.20.0700.05.120	Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan SDM	14 kegiatan	3,873,337,000	14 kegiatan	3,864,045,200	100%	99.76
6.	<b>1.20.0700.07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah peningkatan Kapasitas kelembagaan</b>		<b>210,000,000</b>		<b>200,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>95.43</b>
	1.20.0700.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan validasi data	12 kegiatan	210,000,000	12 kegiatan	200,400,000	100%	95.43

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 2.4** sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN**  
**DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012**

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Data Pendukung	Kajian/ Penelitian
						Uraian	Target	Satuan				
1	2	3	4	5=(4/3)x100	6	7			8	9	10	11
1.20.0700.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134,587,106,430	133,310,466,242	99.05								
1.20.0700.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	23,211,850,000	23,205,602,866	99.97	Terlaksananya pelayanan jasa pengiriman surat-surat perpajakan selama 1 tahun	Terkirimnya surat-surat perpajakan	7.196.160 surat perpajakan	Surat-surat Perpajakan	<u>Target B03 :</u> 1.796.040 surat perpajakan	100		
									<u>Target B06 :</u> 3.598.080 surat <u>Target B09 :</u> 5.397.120 surat <u>Target B12 :</u> 7.196.160 surat	100 100 100		
1.20.0700.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan dan listrik	11,739,200,000	11,384,558,655	96.98	Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1 tahun	Terpenuhinya pembayaran jasa kom,sbr daya air,listrik 1 tahun	Ktr Dinas & UPT, Samsat	Jasa Kom,air dan listrik	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 1	100		
									<u>Target B06 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 2 <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 3 <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pembayaran jasa Kom,air dan listrik selama TW 4	100 100 100 100		
1.20.0700.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	221,600,000	219,317,750	98.97	Terlaksananya pembayaran PKB dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 727 unit	Pembayaran PKB dan Peme liharaan kendaraan dinas	727 unit	Kendaraan Dinas	<u>Target B03 :</u> Pembayaran biaya PKB dan Pemeliharaan Kendaraan dns sejumlah 73 unit <u>Target B06 :</u> Pembayaran biaya PKB dan Pemeliharaan Kendaraan dns sejumlah 73 unit <u>Target B09 :</u> Pembayaran biaya PKB dan Pemeliharaan Kendaraan dns sejumlah 73 unit <u>Target B12 :</u> Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 1 tahun	100 100 100 100		
1.20.0700.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8,946,400,000	8,776,829,730	98.10	peningkatan pelayanan administrasi keuangan	terlaksananya pelayanan administasi	12 kegiatan	kegiatan jasa administrasi keuangan	<u>Target B03 :</u> Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 3 bln sejumlah 3 kegiatan	100		

1.20.0700.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,924,567,640	7,682,199,443	96.94	Peningkatan Kebersihan dan kenyamanan gedung, kantor	Terpeliharanya kebersihan gedung, kantor	12 kegiatan	Kegiatan jasa kebersihan	<u>Target B06 :</u> Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 6 bln sejumlah 6 kegiatan <u>Target B09 :</u> Peningkatan Pelayanan adm perkantoran selama 9 bln sejumlah 9 kegiatan <u>Target B12 :</u> Terlaksananya 12 kegiatan jasa admin keuangan selama 1 tahun <u>Target B03 :</u> Terpeliharanya kebersihan selama 3 bln sejumlah 3 kegiatan <u>Target B06 :</u> Terpeliharanya kebersihan selama 6 bln sejumlah 6 kegiatan <u>Target B09 :</u> Terpeliharanya kebersihan selama 9 bln sejumlah 9 kegiatan <u>Target B12 :</u> Terpeliharanya kebersihan selama 12 bln selama 1 tahun	100		
1.20.0700.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	5,463,335,490	5,366,535,140	98.23	Tersedianya ATK selama1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan ATK sejumlah 215.501	215,501 ATK	A T K	<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bln sejumlah 53.875 <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bln sejumlah 107.750 <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bln sejumlah 161.625 <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 1 th sejumlah 215.501	100		

1.20.0700.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,648,736,000	11,522,410,858	98.92	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi brosur dan brosur dan brg cetakan	14,152,858	Brosur dan brg cetakan	<u>Target B03 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 1.415.285 lembar  <u>Target B06 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 2.830.571 lembar  <u>Target B09 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 4.245.857 lembar  <u>Target B12 :</u> Tersedianya brosur publikasi perpajakan dan pelayanan samsat dan barang cetakan utk menunjang admin perkantoran sebanyak 14.152.858 lembar	100	
1.20.0700.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1,847,413,500	1,748,990,000	94.67	Lancarnya kegiatan operasional pd tiap ktr	Terpenuhi komponen instalasi listrik penerangan bangunan dan gedung	17.612 buah	komponen instalasi penerangan	<u>Target B03 :</u> Terpenuhi komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan gedung sebanyak 1.761 buah  <u>Target B06 :</u> Terpenuhi komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan gedung sebanyak 3.522 buah <u>Target B09 :</u> Terpenuhi komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan gedung sebanyak 5.284 buah <u>Target B12 :</u> Terpenuhi komponen instalasi penerangan listrik bangunan dan gedung sebanyak 17.612 buah	100	
1.20.0700.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	287,680,000	281,883,400	97.99	tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun	Terpenuhi kebutuhan peralatan rmh	4.054 buah	Peralatan RT	<u>Target B03 :</u> Terpenuhi kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 405	100	

													buah <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 811 buah <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 1.216 buah <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya kebutuhan RT RT pakai habis sebanyak 4.054 buah	100
1.20.0700.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1,294,284,000	1,248,268,590	96.44	Tersedianya buku bacaan dan perundang-undangan	Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan		buku					<u>Target B03 :</u> Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan <u>Target B06 :</u> Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan <u>Target B09 :</u> Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan <u>Target B12 :</u> Terpenuhinya buku bacaan dan perundang-undangan	100
1.20.0700.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1,759,914,800	1,759,609,400	99.98	Tersedianya makanan & minuman utk kegiatan rapat	Terpenuhinya makanan dan minuman utk kegiatan rapat		makan dan minuman					<u>Target B03 :</u> Tersedianya makanan dan minuman <u>Target B06 :</u> Tersedianya makanan dan minuman <u>Target B09 :</u> Tersedianya makanan dan minuman <u>Target B12 :</u> Tersedianya makanan dan minuman	100
1.20.0700.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7,279,400,000	7,276,960,700	99.97	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan	Dinas Luar daerah					<u>Target B03 :</u> Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah <u>Target B06 :</u> Terselenggaranya koordinasi <u>Target B09 :</u> Terselenggaranya koordinasi <u>Target B12 :</u> Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100

1.20.0700.01.019	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21,349,125,000	21,346,591,500	99.99	Meningkatnya koordinasi dalam daerah	Terselenggaranya rpt koordinasi dan konsultasi	162 kegiatan	Dinas dalam daerah	<u>Target B03 :</u> Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16 kegiatan <u>Target B06 :</u> Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 32 kegiatan <u>Target B09 :</u> Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 49 kegiatan <u>Target B12 :</u> Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 65 kegiatan	100
1.20.0700.01.022	Penyediaan jasa lembur	25,928,400,000	25,924,730,000	99.99	Terlaksananya pekerjaan diluar jam kerja	Terselesaikannya pekerjaan diluar jam kerja selama 12 bln	Selesaiannya pekerjaan diluar jam kerja	kinerja	<u>Target B03 :</u> Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 3 bln <u>Target B06 :</u> Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 6 bln <u>Target B09 :</u> Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 9 bln <u>Target B12 :</u> Pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal selama 12 bln	100
1.20.0700.01.028	Penyediaan Jasa Kantor	5,685,200,000	5,565,978,210	97.90	Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan	Terlaksananya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 1 th	peningkatan pendapatan	Jasa pelayanan	<u>Target B03 :</u> Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 3 bln <u>Target B06 :</u> Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 6 bln <u>Target B09 :</u> Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 6 bln <u>Target B12 :</u> Meningkatnya pelayanan dan kinerja pendapatan selama 6 bln	100
1.20.0700.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45,465,621,744	44,580,076,981	98.05						
1.20.0700.02.021	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	400,000,000	397,572,480	99.39	Pemeliharaan rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	16 unit rmh dns	Perawatan rumah dinas	<u>Target B03 :</u> Rumah dinas terpelihara sebanyak 4 unit	100

										Target B06 : Rumah dinas terpelihara se banyak 8 unit	100	
										Target B09 : Rumah dinas terpelihara se banyak 12 unit	100	
										Target B12 : Rumah dinas terpelihara se banyak 16 unit	100	
1.20.0700.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	19,058,944,644	19,054,122,041	99.97	Meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja	Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 82 unit	82 unit	Gedung kantor	Target B03 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 20 unit	100		
									Target B06 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 40 unit	100		
									Target B09 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 60 unit	100		
									Target B12 : Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 82 unit	100		
1.20.0700.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	4,102,700,000	4,082,334,980	99.50	Kendaraan dinas terawat dgn baik	Terpeliharanya kendaraan dns operasional roda 2,4 dan 6 sebanyak 737 unit	737 unit	Kendaraan dinas operasional	Target B03 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 sebanyak 184 unit	100		
									Target B06 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 sebanyak 368 unit	100		
									Target B09 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 sebanyak 552 unit	100		
									Target B12 : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2,4 dan 6 sebanyak 737 unit	100		
1.20.0700.02.045	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	10,207,629,700	9,734,968,425	95.37	Tersedianya alat-alat ktr dan rumah tangga selama 1 Thn	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rt	7.664 peralatan	Peralatan kantor dan rumah tangga	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW I sebanyak 1.916	100		
									Target B06 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW II	100		
									Target B09 : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW III sebanyak 5.748	100		

1.20.0700.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	1,299,875,000	1,287,692,315	99.06	1 tahun	Kondisi instalasi air,listrk dan telepon terpelihara ldgn baik di 82 lokasi	82 lokasi	Instalasi air,listrk, telepon	<p><u>Target B12 :</u> Terpenuhinya kebutuhan alat-alat ktr dan rumah tangga TW IV sebanyak 7.664</p> <p><u>Target B03 :</u> Terpeliharanya instalasi air,listrk air,telepon dgn baik di 20 lokasi</p> <p><u>Target B06 :</u> Terpeliharanya instalasi air,listrk air,telepon dgn baik di 40 lokasi</p> <p><u>Target B09 :</u> Terpeliharanya instalasi air,listrk air,telepon dgn baik di 60 lokasi</p> <p><u>Target B12 :</u> Terpeliharanya instalasi air,listrk air,telepon dgn baik di 82 lokasi</p>	100	
1.20.0700.02.048	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu	1,147,690,000	1,117,113,050	97.34	Perawatan dan perbaikan alat-alat besar pembantu	Terpeliharanyalat-alat besar pembantu yg mendukung kegiatan ktr di nas dan upt sebanyak 48 unit	48 unit	Alat-alat besar pembantu	<p><u>Target B03 :</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 12 unit</p> <p><u>Target B06 :</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 24 unit</p> <p><u>Target B09</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 36 unit</p> <p><u>Target B12</u> Terpeliharanya alat-alat besar pembantu sebanyak 48 unit</p>	100	
1.20.0700.02.049	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	5,738,782,400	5,721,413,690	99.70	Perawatan dan perbaikan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan ktr dan rmh tgga	16.896 peralatan	Peralatan ktr dan rmh tangga	<p><u>Target B03 :</u> Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 4.224</p> <p><u>Target B06 :</u> Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 8.448</p> <p><u>Target B09 :</u> Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 12.672</p>	100	



1.20.0700.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2,138,983,700	1,992,836,375	93.17						Target B12 : Terpeliharanya peralatan kantor dan rmh tangga sebanyak 16.896	100
1.20.0700.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	2,138,983,700	1,992,836,375	93.17						Target B03 : Target B06 : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 3.282	100 100
1.20.0700.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,979,887,000	29,572,408,150	98.64						Target B09 : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 3.280	100
1.20.0700.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	884,400,000	879,783,000	99.48	Meningkatnya profesionalitas dan keahlian pegawai	Terlaksananya Diklat Formal untuk profesionalitas dan keahlian	64 Kegiatan	Diklat formal		Target B012 : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 3.280	100
1.20.0700.05.114	Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing	8,777,000,000	8,394,650,000	95.64	Membantu secara administrasi dan kinerja pegawai dlm melaksanakan tugas	Tersedianya tenaga outsourcing sebanyak 410 org dlm 1 tahun	410 Tenaga outsourcing	Tenaga Outsourcing		Target B03 : Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 16 kegiatan Target B06 : Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 32 kegiatan Target B09 : Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 48 kegiatan Target B12 : Terlaksananya kegiatan diklat sejumlah 64 kegiatan	100 100 100 100
1.20.0700.05.119	Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	6,204,050,000	6,195,544,900	99.86	Pemahaman pegawai pada teknis pengelolaan keuangan	Terlaksananya rapat teknis pengelolaan keuangan	10 Kegiatan	Rapat Teknis		Target B03 : Tersedianya tenaga outsourcing sebanyak 410 orang dlm 1 tahun Target B06 : Tersedianya tenaga outsourcing Target B09 : Tersedianya tenaga outsourcing Target B12 : Tersedianya tenaga outsourcing 410 orang	100 100 100
1.20.0700.05.120	Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur	3,873,337,000	3,864,045,200	99.76						Target B03 : Rapat sosialisasi pengelolaan keuangan dan rpt evaluasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Target B06 : Rapat sosialisasi ttg gaji	100



1.20.0700.17.212	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	1,959,375,000	1,809,183,100	92.33	Terlaksananya dana bagi hasil pajak, retribusi dan pendapatan lainnya	Terwujudnya kerjasama dan meningkatnya hasil	4 kegiatan	Rapat koordinasi	daerah TW II Target B09 : Penyusunan dasar perhitungan pajak dan retribusi daerah TW III Target B12 : Tercapainya realisasi target	100
									Target B03 : Rapat koordinasi dgn Kab/kota Target B06 : Rapat SP3 Rapat PSDH Target B09 : Rapat Bagi Hasil Target B12 : Terlaksananya dana bagi hasil pajak retribusi dan pendapatan lainnya	100
1.20.0700.17.213	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	693,095,000	681,628,400	98.35	Terlaksananya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	Terwujudnya kerjasama guna meningkatkan PAD dan Pelayanan Publik	Peningkatan PAD dan pelayanan publik	Rapat koordinasi	Target B03 : Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi	100
									Target B06 : Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi Target B09 : Pengembangan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi Target B12 : Terlaksananya dana bagi hasil pajak dan retribusi dan pendapatan lainnya	100
1.20.0700.17.216	Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan	558,825,000	548,780,000	98.20	Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH	Terealisasinya pemungutan retribusi RTLKHH	Penerimaan PAD dari Retribusi	Kegiatan Pemungutan Retribusi	Target B03 : Terlaksananya kegiatan pemungutan RTLKHH Target B06 : Terlaksananya rapat lelang kayu dan monitoring lelang Target B09 : Terlaksananya rapat bagi hasil Target B12 : Terlaksananya kegiatan pe-	100
										100
										100
										100

1.20.0700.17.217	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan	3,542,185,000	3,471,266,806	98.00	Penguatan kelembagaan	Terwujudnya penguatan kelembagaan dipenda	14 kegiatan	kegiatan	<p>mungutan RTLKHH</p> <p><u>Target B03 :</u> Terlaksananya penyusunan SPP,PO,PK, lakip</p> <p><u>Target B06 :</u> Terlaksananya penyusunan SOP dan Renja</p> <p><u>Target B09 :</u> Terlaksananya rapat finalisasi penyusunan SOP dan Renja</p> <p><u>Target B12 :</u> Rapat PAPBD,RKA terlaksananya 14 kegiatan yang mendukung kelembagaan</p>	100		
1.20.0700.17.219	Peningkatan Pelayanan Publik	15,360,335,986	14,999,598,750	97.65	Peningkatan pelayanan prima	Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit pelayanan	48 KB Samsat	Kegiatan	<p><u>Target B03 :</u> Supervisi ISO di seluruh KB Samsat</p> <p><u>Target B06 :</u> Peningkatan sistem IT</p> <p><u>Target B09 :</u> Pelaksanaan kegiatan pelayanan berbasis IT</p> <p><u>Target B12 :</u> Terlaksananya pelayanan prima pada seluruh unit pelayanan</p>	100		
1.20.0700.17.221	Peningkatan Kinerja Pelayanan	161,900,000	156,740,500	96.81	Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan	5 Kegiatan	Bimbingan Teknis	<p><u>Target B03 :</u> Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Etika Pelayanan</p> <p><u>Target B06 :</u> Bintek Lead Auditor</p> <p><u>Target B09 :</u> Bintek IRCA</p> <p><u>Target B12 :</u> Meningkatnya pelayanan publik</p>	100		
1.20.0700.17.222	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah	1,393,600,000	1,257,960,100	90.27	Meningkatnya pemahaman masyarakat thd sistem dan prosedur pemungutan perpajakan	Tertaksananya kegiatan sosialisasi perpajakan	10 Kegiatan	Sosialisasi	<p><u>Target B03 :</u> Terlaksananya 2 kali kegiatan sosialisasi PPh TW I</p> <p><u>Target B06 :</u> Terlaksananya 4 kali kegiatan sosialisai PPh TW II</p> <p><u>Target B09 :</u> Terlaksananya 6 kali kegiatan sosialisai PPh TW III</p>	100		

1.20.0700.17.223	Pengembangan Pusat Pengolahan Data Elektronik	1,198,227,500	1,182,139,600	98.66	Terwujudnya data yang akurat dan ter up date	Tertaksananya sistem pelaporan dan program aplikasi perpajakan	4 Kegiatan	Aplikasi Software	Target B12 : Terlaksananya 10 kali kegiatan sosialisai perpajakan	100
									Target B03 : Pengembangan sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik	100
									Target B06 : Pengembangan sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik	100
									Target B09 : Pengembangan sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik	100
									Target B12 : Terlaksananya sistem dan program aplikasi pengolahan data elektronik	100
1.20.0700.17.224	Analisis dan Evaluasi Kinerja	4,532,775,000	4,172,490,450	92.05	Laporan analisa dan evaluasi kinerja	Terwujudnya tertib laporan	Laporan	Bimtek analisa & pelaporan dan asistensi	Target B03 : Bimtek Pengendalian eksternal	100
						administrasi PAD, pemungutan dan pelayanan			Target B06 : Asistensi BPKP dlm penyusunan SPIPD , Bimtek manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah	100
									Target B09 : Bimtek dlm pendampingan dlm mengkaji ulang LKPD	100
									Target B12 : Terlaksananya tertib administrasi PAD pemungutan & pelayanan	100
1.20.0700.17.229	Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan	15,754,205,700	15,424,317,400	97.91	meningkatkan efektivitas kerja, kenyamanan dan pelayanan kepada wajib pajak	Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang nyaman dan representatif	KB Samsat	Rehabilitasi fisik	Target B03 : Rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana	100
									Target B06 : Honorarium pelaksana kegiatan tahap peninjauan lokasi	100
									Target B09 : Rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan	100
									Target B12 : Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang nyaman dan representatif	100

1.20.0700.17.249	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	12,861,108,740	11,726,559,500	91.18	meningkatnya penerimaan daerah	PAD	Realisasi target	Rapat	Target B03 : Rapat Pendapatan Daerah Target B06: Rapat Pendapatan Daerah dan pembuatan naskah akademik retribusi daerah Target B09: Rapat Pendapatan Daerah Target B12: Peningkatan penerimaan PAD	100 100 100 100		
1.20.0700.17.257	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	4,154,360,000	3,530,313,245	84.98	Terwujudnya data pendapatan yang akurat dan terupdate dengan baik	Tersedianya data pendapatan yang akuntabel	Validitas data pendapatan	Data Pendapatan	Target B03 : Bimtek pengelolaan pendapatan Target B06: Rapat pengelolaan pendapatan Target B09: Rapat pengelolaan pendapatan Target B12: Data pendapatan yang akurat dan akuntabel	100 100 100 100		
1.20.0700.17.258	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	485,670,000	340,292,200	70.07	Peningkatan teknis opsis/opdat di UPT dan KB Samsat se-Jawa Timur	Terlaksananya kegiatan peningkatan teknis bagi paranata komputer	4 kegiatan	Bimtek	Target B03 : Bimtek Software Target B06: Bimtek Hardware Target B09: Belanja Jasa Konsultasi Target B12: Peningkatan teknis opsis/opdat	100 100 100 100		
1.20.0700.17.259	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	4,253,185,700	4,090,919,591	96.18	Terlaksananya pengembangan sistem jaringan informasi dan komunikasi	Terwujudnya pengembangan sistem jaringan yang terintegrasi	KB Samsat dan UPTD	Jaringan Teknologi Informasi	Target B03 : Pemasangan Software Target B06 : Pemasangan Software dan hardware Target B09 : Pemasangan Software dan hardware seluruh KB Samsat Target B12: Terlaksananya pengembangan sistem jaringan	100 100 100 100		
JUMLAH		293,513,027,500	286,940,115,190	97.76								

## 2.2 USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka pada Tahun Anggaran 2013 telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran yang diwujudkan dalam 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 45 (empat puluh lima) kegiatan.

Dapat dijabarkan secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2013**

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp)
<b>A. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>51.936.482.250,00</b>
1	Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	11.494.950.000,00
2	Peningkatan Kinerja Operasional	1.794.140.000,00
3	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	2.087.880.000,00
4	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan ( <i>Profit/Revenue Sharing</i> ) dan Manajemen Pelayanan Publik ( <i>Benchmarking</i> )	235.817.500,00
5	Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan	848.920.000,00
6	Peningkatan Pengembangan Kelembagaan	2.954.970.000,00

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>		<b>ALOKASI ANGGARAN (Rp)</b>
7	Peningkatan Pelayanan Publik	7.237.043.000,00
8	Peningkatan Kinerja Pelayanan	406.980.000,00
9	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah	674.230.000,00
10	Pengembangan Pusat Pengolahan Data	5.131.450.000,00
11	Analisis dan Evaluasi Kinerja	5.314.500.000,00
12	Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan	7.195.096.750,00
13	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	2.077.410.000,00
14	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	2.098.035.000,00
15	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	474.825.000,00
16	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	1.910.235.000,00
<b>B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>142.664.202.750,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	32.639.780.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.098.504.360,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	171.600.000,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.196.240.000,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.991.017.640,00



<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>		<b>ALOKASI ANGGARAN (Rp)</b>
6	Penyediaan alat tulis kantor	5.639.886.250,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.385.550.000,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	710.274.500,00
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	61.500.000,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	732.400.000,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	2.053.000.000,00
12	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.403.000.000,00
13	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	19.621.975.000,00
14	Penyediaan jasa lembur	30.502.800.000,00
15	Penyediaan Jasa Kantor	4.456.675.000,00
<b>C.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>28.687.445.000,00</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	415.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	13.336.090.000,00
3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	4.835.925.000,00
4	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.780.608.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	1.324.875.000,00

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>		<b>ALOKASI ANGGARAN (Rp)</b>
6	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu	1.247.690.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4.74.257.000,00
<b>D.Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>2.087.550.000,00</b>
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	2.087.550.000,00
<b>E.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>31.075.932.000,00</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	905.760.000,00
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	11.728.400.000,00
3	Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing	8.813.00.000,00
4	Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	4.695.430.000,00
5	Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur	4.933.342.000,00
<b>F.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>		<b>250.000.000,00</b>
1.	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	250.000.000,00

### **2.3. ASUMSI CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran 2013, maka evaluasi pelaksanaan kegiatannya masih bersifat asumsi dan *tentative* (sementara) yang diharapkan dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).

### **2.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk selalu

melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, optimalisasi pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah serta Optimalisasi kontribusi BUMN.

Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Objek-Objek Pajak Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum maksimal, seperti pada penetapan Kendaraan TNI/POLRI sebagai salah satu Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang pada saat ini masih belum bisa dipungut. Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, yang pada saat ini sudah terlaksana adalah Pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak perbankan dalam rangka untuk memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pemasangan lokasi ATM /space promosi.

Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi jumlah Tunggakan (Piutang) Pajak Daerah yang cenderung mengalami peningkatan,
2. Melakukan Optimalisasi usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

4. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta upaya penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga sertifikasi Internasional seperti ISO,
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana perimbangan maupun dengan Kabupaten/ Kota terkait pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah,
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan keahlian.

## **2.5 TANTANGAN DAN PELUANG DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK**

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

### **2.5.1. *Strength* (Kekuatan)**

Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah unit pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar luas di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan visi, misi serta tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
3. Layanan Samsat *Drive Thru* yang melakukan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;
4. Layanan Samsat *Link* yang melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Samsat Keliling yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Layanan Samsat Payment Point yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;
7. Layanan Samsat Delivery yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui Call Center;

8. Layanan Samsat *Corner* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada Plaza/Mall;
9. Layanan Samsat *Quick Response* (SQR) dengan menggunakan kendaraan roda dua.
10. Layanan pengesahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui *e-Channel Bank* yaitu *internet banking*, ATM atau *Mobile Banking*.

#### **2.5.2. Weakness (Kelemahan)**

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang tertentu;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum merata;
4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang.

#### **2.5.3. Opportunity (Peluang)**

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi masyarakat yang semakin meningkat;
2. Iklim investasi di Jawa Timur yang makin kondusif;
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik;

4. Semakin banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain dapat mendatangkan potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
6. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pengurangan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor Rendah Biaya Produksi Ramah Lingkungan (*Low Cost Green Car/LCGC*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi;
7. Perkembangan dinamika nasional dan internasional.

#### **2.5.4. Threat (Ancaman)**

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Tunggakan (Piutang) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat dari tahun ke tahun;
3. Masih banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain yang belum melakukan Pendaftaran Ulang ke wilayah Provinsi Jawa Timur (Mutasi);
4. Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembelian Kendaraan Bermotor minimal 25% dari Harga Jual Kendaraan Bermotor.



## **2.6. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM TERCAPAINYA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam organisasi Pemerintah Daerah, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai SKPD dalam melakukan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Hal penting dalam sistem pengukuran kinerja yang dapat mengindikasikan orientasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

### **2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan**

Secara umum, dapat diinformasikan beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan belum optimalnya tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dengan cara penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan sehingga dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, diperlukan penambahan jumlah petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT yang belum merata. Hampir seluruh UPT, kekurangan petugas di dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan jumlah petugas pada UPT yang kekurangan petugas;

4. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan pembinaan kepada petugas pelayanan;
5. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam peningkatan pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.6.2 Strategi dan Kebijakan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), sehingga terhadap Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu dan e-Samsat dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir,
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc,
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun,
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan,
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu inovasi-inovasi pelayanan publik dan pemberian kemudahan-kemudahan persyaratan bagi pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya kedepan adalah pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian Samsat *Payment Point* yang bekerja sama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain:

- *Homepage* yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>

Layanan melalui *website*, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor berbagai *type* dan tahun pembuatan,

- *e-Samsat* Jatim atau *e-Banking* merupakan pelayanan 24 Jam secara *online* di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI,

- *SMS Info* PKB

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS,

- *SMS* Komplain

Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik :

1. Perluasan dan peningkatan sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;

5. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab;
6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ;
8. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
9. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/ BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

#### **2.7. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU SKPD MAUPUN SKPKD**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk berbagai isu strategis antara lain:

1. Peningkatan PAD;
  - a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
  - b. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen, pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
  - c. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - d. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah;
  - e. Peningkatan hubungan kerjasama antar Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.
2. Pelayanan Publik;
  - a. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan.

3. Peningkatan Kelembagaan dan SDM

Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dengan tolok ukur pada Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

#### **3.1. TUJUAN**

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terwujudnya Pelayanan Publik yang baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondusional, partisipatif, kesamaan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga



dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang baik dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban.

Secara lebih terinci tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara yang dimiliki dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mewujudkan sebuah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada azas transparan, yaitu semua biaya secara transparan dan tanpa ada biaya pemungutan lainnya, dengan rincian yang detail dan jelas, serta kondisional yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat/Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

### 3.2. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2009-2014), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan (seperti yang tersebut di atas), yaitu :

**Tujuan-1** : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). **Sasaran Strategisnya** adalah **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan Indikator Sasarannya adalah :

- a. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

**Tujuan-2** : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban.

**Sasaran Strategisnya** adalah **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** dengan Indikator Sasarannya adalah :

- a. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
- b. Jumlah KB. Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu melakukan peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang telah berjalan dan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pencapaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB),
3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
4. Jumlah KB Samsat yang Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

**Tabel 3.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis**

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
Uraian		Uraian		Indikator Kinerja
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	I	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				2. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
II	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keseimbangan kesamaan hak dan kewajiban	II	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				2. Jumlah KB Samsat yang Melaksanakan SMM ISO 9001:2008

### 3.3. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2013 sebanyak 6 (enam) Program (dengan program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).

Program-program tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

### **3.4. KEGIATAN**

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program prioritas kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp51.936.482.250,00 terdiri atas :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 11.494.950.000,00
2. Peningkatan kinerja operasional sebesar Rp 1.794.140.000,00
3. Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait sebesar Rp 2.087.880.000,00
4. Kerjasama dengan sektor Publik/BUMN dan pengembangan sharing pendapatan (*profit/revenue sharing*) dan manajemen pelayanan publik (*benchmarking*) sebesar Rp 235.817.500,00

5. Retribusi tempat pelelangan kayu hasil hutan sebesar Rp 848.920.000,00
6. Peningkatan pengembangan kelembagaan sebesar Rp 2.954.970.000,00
7. Peningkatan pelayanan publik sebesar Rp 7.237.043.000,00
8. Peningkatan kinerja pelayanan sebesar Rp 406.980.000,00
9. Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan daerah Rp 674.230.000,00
10. Pengembangan pusat pengolahan data sebesar Rp 5.131.450.000,00
11. Analisis dan evaluasi kinerja sebesar Rp 5.314.500.000,00
12. Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan sebesar Rp 7.195.096.750,00
13. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.077.410.000,00
14. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah Rp 2.098.035.000,00
15. Peningkatan Kompetensi pranata komputer KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 474.825.000,00
16. Pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi di KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 1.910.235.000,00.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta target dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (Tahun Anggaran (Tahun Anggaran 2012) dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan

manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya, dengan selesainya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Program dan Kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.

Surabaya, Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Drs. Ec. A.A. GDE RAKA WIJA, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19550219 198003 1 009**

